

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution dkk, Penyunting, *Instrumen Internasional pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, PT. DANA BHAKTI PRIMA YASA, Yogyakarta, 1996.
- David Weisbrodt, *Hak-hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Prespektif Kesejahteraan dalam Hak-hak Asasi Manusia*, disunting oleh Peter Davies, diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor, Jakarta, 1994.
- Kunarto, *HAM dan POLRI*, PT CIPTA MANUNGGAL, Jakarta 1997.
- Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, PT CIPTA MANUNGGAL, Jakarta, 1996.
- Kusnardi M dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PSHTN FH UII, Yogyakarta, 1999.
- Mansour Fakhri, Antonius M indrianto, Eko Prasetyo, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*, INSIST PRESS, Yogyakarta, 2003.
- Moh. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 1993.
- Nickel, J.W, *Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Pusat Studi Hukum FH UII dan Gama Media Yogyakarta, 1999.
- Romli Atmasasmita, *REFORMASI HUKUM, HAK ASASI MANUSIA & PENEGAKAN HUKUM*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2001.
- Suryadi Radjab, *INDONESIA: HILANGNYA RASA AMAN, Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia*, PBHI dan TAF, Jakarta, 2002.

## **Artikel**

Soewargo Kartodiharjo, "Harus Tahu Konsep Hak Asasi", Majalah Mahkamah Nomor 03/Tahun IIV/1992.

Yuliatun Ignasia, "Makalah Upaya Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia", Yogyakarta, 2000.

## **Perundang-undangan**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor RI XVII/MPR/1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I,II,III,IV

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, dan DPRD.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia